

PENANGGULANGAN RESIKO BENCANA BERBASIS KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT

Oleh

AGUNG MANGHAYU

Intitut Pemerintahan Dalam Negeri

ABSTRACT

Disaster is an event or series of events that threaten and disrupt people's lives and livelihoods caused by both natural and / or non-natural factors and human factors resulting in the occurrence of human casualties, environmental damage, property loss, and psychological impact. Disaster is no longer considered a sporadic phenomenon, but as much as possible the disaster is managed and reduced. Various initiatives to improve community knowledge and preparedness in anticipating the disaster began in Indonesia at various levels of administration. In order to protect the community from the great loss in the disaster it is necessary to have knowledge of the preparedness that is a series of activities that must be known by the citizens of the family to prepare themselves to anticipate the disaster situation quickly and appropriately.

Keywords: disaster, managed, reduced, preparedness

I. Pendahuluan

Penanggulangan bencana ditinjau dari perspektif persepsi publik menjadi sangat urgen dan signifikan untuk diketahui sebagai pengetahuan mendasar bagi masyarakat tentang hal yang harus dilakukan dalam menanggulangi bencana. Saat ini kajian mengenai penanggulangan bencana bukan lagi menjadi dominasi ilmu pasti yang konsentrasinya lebih mengarah kepada pembangunan fisik sebagai cara penanggulangan bencana, melainkan juga telah merambah kepada cabang ilmu sosial lainnya seperti sosiologi dan antropologi. Pembahasan aspek penanggulangan bencana dari perspektif ilmu sosial akan lebih mengarah pada pola behavioralisme seseorang dalam mempersepsikan suatu bencana. Menurut sosiolog Prof. Dr. Heru Nugroho (2008), setiap individu, komunitas maupun unit sosial yang lebih besar mengembangkan kapasitas sistem penyesuaian dalam merespons ancaman. Renspons itu bersifat jangka pendek yang disebut mekanisme penyesuaian (*coping mechanism*) atau yang lebih

jangka panjang yang dikenal sebagai mekanisme adaptasi (*adaptatif mechanism*). Cara pandang ini setidaknya menjadi penting untuk melihat dampak bencana terhadap kehidupan sosial kemasyarakatan.

Bencana kini bukan lagi dianggap sebagai fenomena yang sporadis, namun sebisa mungkin bencana tersebut dikelola dan direduksi. Oleh karena itulah, bencana bukan lagi dianggap sebagai hazard yang menempatkan bencana sebagai sesuatu yang absurd untuk dikelola. Akan tetapi, bagaimana kemudian menempatkan unsur keselamatan (*safety*) dalam bencana tersebut. Munculnya gagasan “kerentanan” (*vulnerability*) adalah untuk mengakomodasi pranata maupun unit sosial sebagai bagian dari kajian bencana. Khususnya terhadap eksistensi peradaban dan kehidupan manusia yang berada di dunia. Bencana berikutan faktor pemicu maupun implikasinya terhadap kehidupan manusia perlu untuk direduksi maupun terdeteksi sedini mungkin, sehingga dari situlah kemudian menciptakan skema manajemen bencana. Salah satu faktor yang nyata bisa menjelaskan premis tersebut adalah *tragedy of the commons* (tragedi kebersamaan). Tragedi ini merujuk pada suatu peristiwa dimana lingkungan alam menjadi rusak karena ulah kerakusan manusia.

Manusia adalah individu yang rasional yang senantiasa untuk mengeruk keuntungan sebesar-besarnya. Maka implikasi yang timbul kemudian adalah adanya membagi atau mengkafling lokasi tertentu menjadi komoditas ekonomi. Akibatnya yang terjadi adalah tatanan ekologi menjadi rusak karena ulah eksplorasi dan eksploitasi alam secara masif.

Faktor nyata lainnya adalah menguatnya permintaan dalam mengelola alam yang menjadi dominan ketimbang *state way* (cara negara) dan *common pool resources* (cara masyarakat) yang lebih memandang alam sebagai sumber kemakmuran. Maka ketika kemakmuran yang dikeruk dari alam itu habis, alam menciptakan faktor laten terjadinya bencana alam. Mekanisme masyarakat berbasis kearifan lokal sebenarnya merupakan bentuk kesadaran menghargai relasi seimbang antara alam dan manusia yang tujuannya jelas menghindari adanya dampak destruktif sehingga apabila manusia tidak menghargai alam dengan sepatutnya maka harus siap menerima akibatnya.

II. Tinjauan Literatur

Menurut UU No.24/2007 tentang Penanggulangan Bencana, bencana adalah Peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Pengertian bencana menurut *International Strategy for Disaster Reduction (ISDR)* : Suatu gangguan serius terhadap keberfungsian suatu masyarakat, sehingga menyebabkan kerugian yang meluas pada kehidupan manusia dari segi materi , ekonomi atau lingkungan dan melampaui kemampuan masyarakat yang bersangkutan untuk mengatasi dengan menggunakan sumber daya mereka sendiri

2.1. Jenis-jenis bencana

- Bencana alam: bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh antara lain:Banjir, gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan/puting beliung, dan tanah longsor
- Bencana non alam: bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemik, dan wabah penyakit
- Bencana sosial: bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, teror, kebakaran bahkan saat ini kemiskinan dan , penyalahgunaan Napza juga dapat dimasukkan dalam kategori bencana sosial.

2.2 . Hakikat Mitigasi Bencana

Bencana telah menjadi isu pembangunan, karena hasil pembangunan yang telah dirintis puluhan bahkan ratusan tahun dapat musnah atau rusak seketika dengan adanya bencana, perekonomian masyarakat dan negara pun banyak mengalami kemunduran, banyak prasarana dan sarana ekonomi, sosial dan budaya yang rusak. Masyarakat yang terkena bencana seringkali harus menata ulang kehidupannya dari awal, mereka harus pindah ke tempat lain, dan mulai penghidupan di tempat baru.

Mitigasi (*mitigate*) berarti tindakan-tindakan untuk mengurangi bahaya supaya kerugian dapat diperkecil. Mitigasi meliputi aktivitas dan tindakan-tindakan. Perlindungan yang dapat diawali dari persiapan sebelum bencana itu berlangsung, menilai bahaya bencana, penanggulangan bencana, berupa penyelamatan, rehabilitasi dan relokasi. Menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri RI No. 131 Tahun 2003, mitigasi atau penjinakan adalah upaya dan kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi dan memperkecil akibat-akibat yang ditimbulkan oleh bencana, yang meliputi kesiapsiagaan, kewaspadaan dan berbagai kemampuan untuk mengatasinya.

Negara Indonesia secara geografis dan geologis terletak di daerah yang rentan terhadap bencana alam. Dari 33 provinsi, 25 provinsi diidentifikasi oleh Departemen Dalam Negeri sebagai daerah rawan bencana. Daerah gempa, menurut ahli geologi, menyebar di hampir seluruh wilayah negeri, mulai dari ujung Sumatera bagian utara sampai dengan bagian utara Pulau Papua. Serangkaian bencana telah melanda negeri ini, menelan banyak korban jiwa dan kerugian harta benda

Tingginya kerentanan terhadap bencana, maka masyarakat Indonesia harus bersiaga mengantisipasi terjadinya bencana. Karena itu, upaya untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dengan program yang 11 terstruktur dan komprehensif menggunakan kombinasi *pendekatan bottom-up dan top-down* menjadi sangat penting, utamanya untuk mengurangi resiko bencana.

Berbagai inisiatif untuk meningkatkan pengetahuan dan kesiapsiagaan masyarakat dalam mengantisipasi bencana mulai dilakukan di Indonesia di berbagai tingkatan administrasi. Upaya ini melibatkan banyak lembaga dan institusi, baik di tingkat lokal dan nasional maupun internasional, seperti: KOGAMI Padang, LIPI, ESDM, ITB, PMI/IFRC dan UNESCO yang bekerjasama dengan Bakornas, MPBI, USAID, CRS dan Yayasan IDEP. Sebagian pemerintah daerah juga mengklaim telah melakukan upaya tersebut di daerahnya masing-masing. Menurut Horan dan Schooley (2007).

Upaya peningkatan kesiapsiagaan masyarakat yang telah dilakukan belum dapat diketahui, karena belum ada *framework* dan *tools* untuk menilai tingkat kesiapsiagaan masyarakat dan keberlanjutan kegiatan tersebut. Selama ini upaya peningkatan kesiapsiagaan masyarakat dilaksanakan berdasarkan kepedulian, tujuan dan kemampuan dari institusi-institusi yang bersangkutan. Dengan demikian belum dapat diketahui

apakah upaya-upaya itu telah memenuhi semua unsur yang diperlukan untuk kesiapsiagaan terhadap bencana.

2.3. Mitigasi Bencana Berbasis Masyarakat

Penguatan kelembagaan, baik pemerintah, masyarakat, maupun swasta merupakan faktor kunci dalam upaya mitigasi bencana. Penguatan kelembagaan dalam bentuk dalam kesiapsiagaan, sistem peringatan dini, tindakan gawat darurat, manajemen barak dan evakuasi bencana bertujuan mewujudkan masyarakat yang berdaya sehingga dapat meminimalkan dampak yang ditimbulkan oleh bencana. Perwujudan Masyarakat atau komunitas yang berdaya dalam menghadapi bencana dapat diwujudkan melalui Siklus Pengurangan Risiko Berbasis Masyarakat/Komunitas berikut:



Bencana kini bukan lagi dianggap sebagai fenomena yang sporadis, namun sebisamungkin bencana tersebut dikelola dan direduksi. Oleh karena itulah, bencana bukan lagi dianggap sebagai hazard yang menempatkan bencana sebagai sesuatu yang absurd untuk dikelola. Akan tetapi, bagaimana kemudian kita menempatkan unsur keselamatan (safety) dalam bencana tersebut. Munculnya gagasan “kerentanan” (vulnerability) adalah untuk mengakomodasi pranata maupun unit sosial sebagai bagian

dari kajian bencana. Khususnya terhadap eksistensi peradaban dan kehidupan manusia yang berada di dunia. Bencana berikutan faktor pemicu maupun implikasinya terhadap kehidupan manusia perlu untuk direduksi maupun terdeteksi sedini mungkin, sehingga dari situlah kemudian menciptakan skema manajemen bencana. Relasi kekuasaan terhadap penanggulangan bencana adalah melihat bagaimana Pemerintah Daerah dalam menanggulangi dampak destruktif bencana baik dari segi sosial maupun ekologis dan konstruksi informasi publik yang dihadirkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah terhadap bencana dan dampaknya kepada masyarakat. Isu keadilan berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan sosial bagi masyarakat dan legitimasi sendiri terkait dengan tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah dalam menanggulangi bencana (Douglas, 2001 : 34).

Paradigma risiko muncul sebagai wujud dari perkembangan lanjutan modernisasi kehidupan manusia di dunia. Istilah risiko sendiri diartikan sebagai sebuah kemungkinan serangan fisik yang diakibatkan dari perkembangan teknologi dan prosesnya. Artinya, risiko bencana sendiri terjadi dari sebuah proses perkembangan manusia di dunia dan bukan disebabkan oleh faktor alamiah bencana alam. Pemahaman risiko menarik dicermati untuk melihat keseimbangan relasi antar manusia dan alam selama ini yang menunjukkan gejala yang tidak seimbang. Peristiwa mutakhir yang terjadi seperti pemanasan global, efek gas rumah kaca, bencana radiasi nuklir di Jepang tahun 2011 lalu merupakan bencana yang disebabkan oleh berkembangnya modernitas manusia (manufactured risk). Meskipun ada juga bencana yang disebabkan murni oleh faktor alam (natural risk) seperti gempa bumi dan gunung meletus. Namun pemahaman risiko sendiri lebih mengarah pada faktor ketidakseimbangan relasi antara manusia dengan alam. Salah satu faktor nyata yang bisa menjelaskan premis tersebut adalah *tragedy of the commons* (tragedi kebersamaan).

Tragedi ini merujuk pada suatu peristiwa dimana lingkungan alam menjadi rusak karena ulah kerakusan manusia. Manusia adalah individu yang rasional yang senantiasa untuk mengeruk keuntungan sebesar-besarnya. Maka implikasi yang timbul kemudian adalah adanya kaplingisasi alam menjadi komoditas ekonomi. Akibatnya yang terjadi adalah tatanan ekologi menjadi rusak karena ulah eksplorasi dan eksploitasi alam secara masif. Sekarang ini berbicara bencana lebih banyak didominasi oleh pemahaman

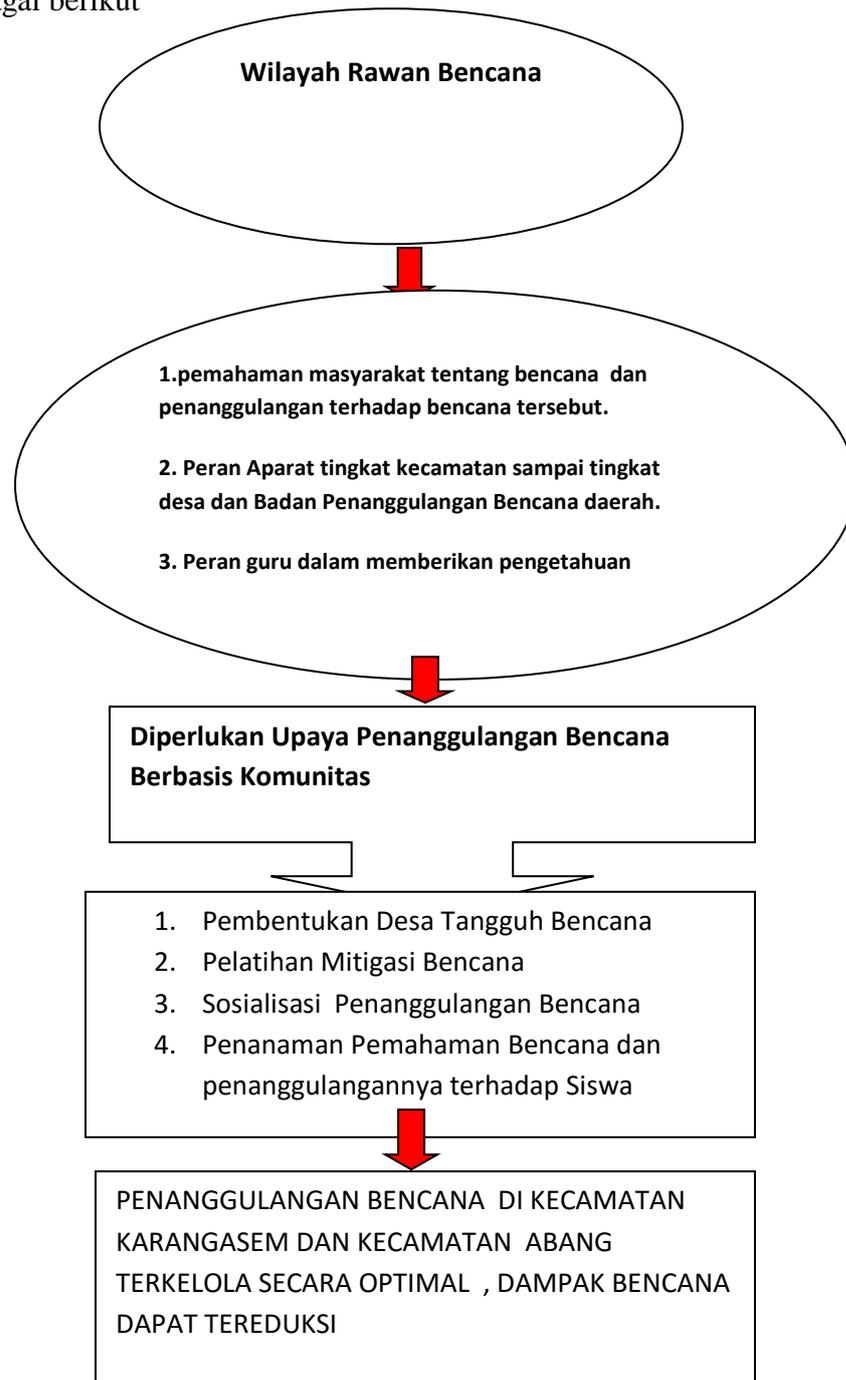
ketahanan, modernitas, dan ekologis yang menempatkan bencana sebagai bagian dari unit sosial kehidupan manusia di dunia apalagi yang terdampak bencana. Manusia modern kian menyadari bahwa bencana sebagai sesuatu yang tidak dapat terelakkan dari kehidupan masa kini entah itu dalam wujud nyata (manifest) ataukah tersembunyi (laten) (Beck, 1992 : 42).

Bencana alam bisa terjadi sewaktu-waktu dan tidak dapat diprediksi, kondisi demikian sering mengejutkan orang saat bencana tiba-tiba terjadi, masyarakat sering tidak siap ketika bencana terjadi kondisi ketidaksiapan masyarakat ini disebabkan masyarakat memang tidak mempunyai pengetahuan yang cukup menyangkut kesiagaan dalam menghadapi bencana. Untuk melindungi masyarakat dari kerugian yang besar dalam bencana maka perlu adanya Pengetahuan tentang kesiapsiagaan yaitu serangkaian kegiatan yang harus diketahui oleh warga masyarakat yang terdiri dari keluarga – keluarga untuk menyiapkan diri mengantisipasi situasi bencana secara cepat dan tepat guna. Kesiapsiagaan menghadapi bencana adalah suatu kondisi suatu masyarakat yang baik secara individu maupun kelompok yang memiliki kemampuan secara fisik dan psikis dalam menghadapi bencana. Dalam **teori Benyamin Blum** menyatakan bahwa pengetahuan atau kognitif merupakan domain yang sangat penting untuk terbentuknya tindakan seseorang. Dalam teori tersebut dijelaskan pula bahwa sikap/perilaku merupakan faktor terbesar kedua setelah faktor lingkungan yang mempengaruhi individu atau masyarakat. Sikap merupakan faktor penentu perilaku, karena sikap berhubungan dengan persepsi, kepribadian, dan motivasi. Sikap diartikan sebagai kesiapsiagaan mental, yang dipelajari dan diorganisasi melalui pengalaman , dan mempunyai pengaruh tertentu atas cara tanggap seseorang terhadap orang lain, objek, dan situasi yang berhubungan dengannya (Gibson, 1998). Sikap selalu berkaitan dengan komponen emosional, komponen kognitif (persepsi, pendapat, keyakinan) dan perilaku. Menurut Sukidjo sikap adalah keadaan mental dan saraf dan kesiapan yang diatur melalui pengalaman yang memberikan pengaruh dinamis atau terarah terhadap respon individu pada semua obyek dan situasi yang berkaitan dengannya. Sikap merupakan penilaian seseorang terhadap stimulus atau obyek. Setelah orang mengetahui stimulus atau obyek proses selanjutnya akan menilai atau bersikap terhadap stimulus atau obyek tersebut. Pengelolaan tanggap darurat bencana, rekonstruksi atau rehabilitasi pasca bencana dengan memperhatikan kearifan lokal. Peningkatan kapasitas masyarakat

dalam menanggulangi risiko bencana urgent dilakukan, di antaranya dengan melakukan pelatihan penanggulangan bencana atau dengan simulasi-simulasi yang dapat meningkatkan pemahaman masyarakat dalam menanggulangi risiko bencana.

III. Kerangka Pemikiran

Penanggulangan bencana berbasis kearifan lokal dapat digambarkan kerangka pemikiran sebagai berikut



IV. Hasil dan Pembahasan

4.1 Analisis alternatif Kebijakan yang dapat menyelesaikan permasalahan :

Kepastian Tujuan

Upaya meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menanggulangi risiko bencana ini diperlukan penyelenggaraan program DRR (Disaster Risk Reduction) atau pengurangan risiko bencana di Desa. Kegiatan pelatihan pengurangan risiko bencana berbasis masyarakat (Community Managed Disaster Risk Reduction) ini dilakukan dalam upaya meningkatkan keberdayaan masyarakat Desa kegiatan pelatihan ini harus betul –betul dipahami karena pentingnya hal tersebut (pelatihan Penanggulangan resiko bencana) sebaiknya dilaksanakan satu bulan, apalagi kegiatan pelatihan ini dilakukan dengan melibatkan masyarakat desa terdampak.

Diawali mengumpulkan warga desa yang terdampak, Ancaman bencana yang pertama adalah tanah longsor di area perbukitan desa yang membahayakan pemukiman dan lahan pertanian penduduk. Ancaman bencana yang kedua adalah banjir. Banjir pernah melanda wilayah desa yang rendah terutama yang menjadi lahan pertanian dan pemukiman. Dari kegiatan diskusi dengan masyarakat akan diketahui ancaman desa yang terdampak bencana yang sewaktu-waktu menimpa Desa.

Ancaman bencana yang pertama adalah tanah longsor di area perbukitan desa yang membahayakan pemukiman dan lahan pertanian penduduk. kemudian ancaman bencana yang kedua adalah banjir, banjir yang melanda wilayah desa yang rendah terutama desa yang menjadi lahan pertanian dan pemukiman juga harus jelas pemetaannya. Desa tidak memiliki kebijakan tata ruang desa dan rencana pembangunan jangka panjang dalam pengelolaan sumber daya alam. Ini menyebabkan seringkali terjadi alih fungsi lahan dan akhirnya membawa eksekusi lain berupa menyempitnya lahan pertanian dan terjadinya risiko banjir.

Kemiskinan penduduk yang semakin meluas membawa eksekusi kerusakan ekosistem kawasan dan menurunnya daya dukung lingkungan. Pada sisi yang lain masyarakat desa dan pemerintah desa belum memiliki pengetahuan dan ketrampilan yang memadai dalam bidang PRB (Penanggulangan Risiko Bencana). Untuk perempuan juga belum banyak keterlibatannya dalam perencanaan dan pengambilan kebijakan strategis penanganan kedaruratan dan Penanggulangan Resiko Bencana. Meskipun demikian di Desa terdapat potensi yang dapat dikembangkan dalam hal-hal yang

menyangkut penanggulangan risiko bencana hal ini bisa dilihat secara tradisional masyarakat memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam penanganan kedaruratan meskipun masih sangat terbatas.

Di desa cukup banyak organisasi–organisasi sosial dan keagamaan yang sekarang belum terorganisir yang dapat menjadi kekuatan dalam gerakan penanggulangan resiko bencana PRB. Budaya gotong royong, toleransi dan semangat keswadayaan berjalan baik di desa dan hal ini menjadi satu kekuatan penting dalam penanganan bencana. Untuk meningkatkan kapasitas Penanggulangan Resiko Bencana masyarakat Desa yang terdampak bencana.

Pertama adalah membangun pemahaman masyarakat di Desa mengenai ancaman, kerentanan, kapasitas dan potensi resiko tanah longsor dan tanah amblas, banjir serta faktor-faktor yg mempengaruhi diwilayahnya.

Kedua menyiapkan kader-kader lokal yang potensial untuk menggerakkan partisipasi masyarakat dalam membangun gerakan mengurangi resiko kebencanaan.

Ketiga melakukan pemetaan resiko bencana tanah longsor dan banjir secara partisipatif.

Keempat meningkatkan peran dan posisi strategis perempuan dalam kegiatan Penanggulangan Resiko Bencana desa. Yang terakhir mengembangkan aksi-aksi inovatif Penanggulangan Resiko Bencana Masyarakat desa.

Bentuk-bentuk kegiatan yang dilakukan di antaranya adalah :

1. Meningkatkan kesadaran warga dan pemerintah desa akan pentingnya Penanggulangan Resiko Bencana. Kegiatan ini dilakukan dengan menyelenggarakan pelatihan pembuatan media komunitas, roadshow pemutaran media komunitas dan diskusi antar warga desa.
2. Pembentukan tim inti (komite) PRB Desa. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mewujudkan adanya tim desa yang berfungsi mengorganisir penanggulangan bencana. Pada tahap ini dilakukan identifikasi, seleksi dan konsultasi pembentukan tim dan juga menyelenggarakan pelatihan tim inti mengenai kerangka kerja Penanggulangan Resiko Bencana.
3. Penyusunan peta resiko bencana. Kegiatan ini berkaitan dengan upaya melakukan pemetaan dan analisa risiko bencana di tingkat dusun dan juga di tingkat desa.

4. Penyusunan strategi dan kebijakan desa untuk Penanggulangan Resiko Bencana
Dalam kegiatan ini dilakukan berbagai pelatihan tentang PRB di tingkat dusun dan desa. Juga diselenggarakan pelatihan rencana aksi di tingkat desa dan finalisasi rencana pengurangan risiko bencana yang diharapkan akan menjadi peraturan desa.
5. Peningkatan kapasitas teknis dan non teknis tim inti (komite) PRB Desa. Pada kegiatan ini dilakukan pelatihan–pelatihan tindakan kedaruratan dan pelatihan teknis penanganan tanah longsor yang di antaranya dengan melakukan pelatihan manajemen konservasi lahan.
6. Simulasi penanganan tanggap darurat bencana tanah longsor. Simulasi ini menggambarkan hal-hal yang harus dilakukan saat terjadi bencana. Dari simulasi ini diharapkan tim inti mampu melakukan penanganan korban saat bencana terjadi.
7. Peningkatan tim inti PRB menjadi organisasi rakyat. Kegiatan ini dilakukan dengan menyelenggarakan pelatihan manajemen organisasi dan diharapkan pengurus akan mampu mengelola dan mengembangkan organisasi yang memberi manfaat besar bagi masyarakat.

4.2 Kebijakan dan Strategi

1. Strategi yang dapat diterapkan untuk mewujudkan Desa/Kelurahan tangguh dalam penanggulangan resiko bencana diantaranya sebagai berikut :
 - a. Melibatkan seluruh lapisan masyarakat, terutama yang paling rentan secara fisik, ekonomi, lingkungan, sosial, termasuk mendapat perhatian khusus pada upaya pengurusan ke dalam program PRB.
 - b. Penggunaan dan pemanfaatan sumber daya mandiri setempat dengan fasilitas eksternal yang seminimum mungkin.
 - c. Membangun sinergitas program dengan seluruh pelaku (kementerian, lembaga negara, organisasi sosial, lembaga usaha, dan perguruan tinggi) untuk memberdayakan masyarakat desa/kelurahan.
 - d. Dukungan dalam bentuk komitmen kebijakan, sumber daya dan bantuan teknis dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota dan pemerintah desa sesuai kebutuhan dan kehendak masyarakat.

- e. Peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan potensi ancaman desa/kelurahan dan kerentanan warga.
- f. Pengurangan kerentanan masyarakat desa/kelurahan untuk mengurangi risiko bencana.
- g. Peningkatan kapasitas masyarakat untuk mengurangi dan beradaptasi dengan risiko bencana.
- h. Penerapan keseluruhan rangkaian manajemen risiko mulai dari identifikasi risiko, pengkajian risiko, penilaian risiko, pencegahan, mitigasi, pengurangan risiko, dan transfer risiko.
- i. Pemaduan upaya pengurangan risiko bencana ke dalam pembangunan berkelanjutan.
- j. Pengarusutamaan pengurangan risiko bencana ke dalam perencanaan program dan kegiatan lembaga/institusi sosial desa/kelurahan, sehingga PRB meresap pada seluruh kegiatan di tingkat masyarakat.

4.3. Prinsip-Prinsip

Masyarakat yang sudah mencapai tingkat ketangguhan terhadap bencana akan mampu mempertahankan struktur dan fungsi mereka sampai ke tingkat tertentu bila terdampak bencana. Program Desa/Kelurahan tangguh bencana dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip berikut :

- a. Bencana adalah urusan bersama
- b. Berbasis pengurangan risiko bencana
- c. Pemenuhan hak masyarakat
- d. Masyarakat sebagai pelaku utama
- e. Partisipatoris
- f. Pemanfaatan sumberdaya lokal
- g. Inklusif
- h. Berlandaskan kemanusiaan
- i. Keadilan dan kesetaraan gender
- j. Keberpihakan pada kelompok rentan
- k. Transparansi dan akuntabilitas

- l. Kemitraan
- m. Multi ancaman
- n. Otonomi dan desentralisasi pemerintahan
- o. Pemaduan dalam pembangunan berkelanjutan
- p. Diselenggarakan secara lintas sector

4.4 Indikator

Penyusunan indikator desa/kelurahan tangguh bencana berdasarkan sistem penanggulangan bencana yang meliputi aspek legislasi, perencanaan, kelembagaan, pendanaan, pengembangan kapasitas, serta penyelenggaraan penanggulangan bencana. Adapun indikator tersebut adalah :

- a. Kebijakan/Peraturan di desa/kelurahan tentang PB/PRB
Rencana Penanggulangan Bencana, Rencana Aksi Komunitas, dan Rencana Kontijensi
- b. Forum PRB
- c. Relawan Penanggulangan Bencana
- d. Kerjasama antar pelaku dan antar wilayah
- e. Dana tanggap darurat
- f. Dana PRB
- g. Pelatihan untuk pemerintah desa/kelurahan
- h. Pelatihan untuk tim relawan
- i. Pelatihan untuk warga desa/kelurahan
- j. Pelibatan/partisipasi warga
- k. Pelibatan perempuan dalam tim relawan
- l. Peta dan analisa risiko bencana
- m. Peta dan jalur evakuasi serta tempat pengungsian
- n. Sistem peringatan dini
- o. Pelaksanaan mitigasi struktural (Fisik)
- p. Pola ketahanan ekonomi untuk mengurangi kerentanan masyarakat
- q. Perlindungan kesehatan kepada kelompok rentan
- r. Pengelolaan sumber daya alam untuk PRB
- i. Perlindungan aset produktif utama masyarakat

V. Penutup

5.1. Kesimpulan.

Dari analisa perspektif “kearifan lokal” sebagai paradigma alternatif dalam penanggulangan risiko bencana sebagaimana yang dilaporkan dalam tulisan ini dapat disimpulkan berbagai hal.

1. persepsi publik tentang bencana memegang peranan penting dalam penanganan bencana. Karakter publik seperti rasional, tradisional, individualis, maupun kolektif turut mempengaruhi kebijakan perencanaan ditingkat kabupaten terhadap bencana, sehingga perlu difahamkan pada masyarakat dan semua lembaga pendidikan disemua tingkat sesuai dengan pemahamannya.
2. Dinamika yang berkembang dalam masyarakat cukup bervariasi antara menilai bencana sebagai hukuman Tuhan maupun bencana sebagai konsekuensi dari perkembangan teknologi yang terkendali. Implikasinya terlihat dalam memperlakukan alam dalam perspektif manusia, apakah hanya terenggok sebagai benda mati saja namun menyimpan bahaya laten ataukah selama ini melihat alam sebagai kawan dan harus dijaga kelestariannya. Dikotomi konstruksi saja berimplikasi pada kebijakan publik tentang bencana. Pada masyarakat yang memiliki tingkat modernitas dan kemajuan teknologi akan melihat alam sebagai entitas yang perlu dijaga kelestariannya. Hal ini nampak dari pemahaman ekologis yang begitu kuat di masyarakat seperti dari hal kecil misalnya dilarang membuang sampah di sungai untuk menghindari banjir.
3. Bencana sudah menjadi isu rutinitas dalam kehidupan sehari-hari sehingga tidaklah kaget apabila terjadi bencana karena sudah diprediksi dan direncanakan manajemen bencananya. Sedangkan bagi masyarakat yang belum menjadikan bencana sebagai isu publik. Dalam penanggulangan bencananya akan terlihat sangat fatalistik dimana yang ada hanya pasrah ketika bencana itu datang sambil berharap ada uluran bantuan datang sesegera mungkin. Pada akhirnya pola tersebut menurun pada rezim pengaturan bencana yang menempatkan negara sebagai aktor dominan dalam penanganan isu bencana.

4. Perilaku yang fatalis akan meminimalis dalam melakukan upaya tanggap darurat berbeda dengan perilaku yang hierarkis yang maksimalis dalam melakukan penanganan bencana. Begitupun juga dalam konteks perilaku aparat yang individualis lebih fleksibel dalam bencana, namun kurang dalam kebersamaan dan perilaku kemudian ada yang egalitarian deliberatif dalam bencana serta menjunjung tinggi kebersamaan dalam menghadapi bencana sebagai masalah bersama (commons problem), inilah yang harusnya dilakukan oleh aparatur dampai dengan masyarakat desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Beck, Ulrich. 1992. Risk Society : Toward New Modernity. London : Sage Publication.
- Dous, Mglary. 2001. Risk and Blame. New York : Taylor & Francis
- Gibson (1998). Pengelolaan Bencana Terpadu : Banjir, Longsor, Kekeringan dan Tsunami. Yusuf Watampone Press. Jakarta.
- Notoadmodjo, S. (2002). Promosi Kesehatan Teori dan Aplikasi. Cetakan Pertama, PT Rineka Cipta, Jakarta
- Sunaryo. (2004). Disaster Manajemen di Negeri Rawan Bencana. Cetakan Pertama, PT Aksara Grafika Pratama, Jakarta
- Sumber dari Internet: <http://id.shvoong.com/exact-sciences/earth-sciences/1932953-manajemen-bencana/#ixzz1M6b10COy>